

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Utara Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah demi terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Untuk itu, Badan Penghubung memiliki kewajiban

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang diukur berdasarkan Realisasi fisik keuangan dalam Renstra 2021 – 2026, khususnya RKA Tahun 2021.

1. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan bahan LKPj Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Utara Akhir Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887):
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota diinstruksikan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. 15 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi lain Provinsi Kalimantan Utara.
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 33 Tahun 2017 tentang E-Government.

1. 2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Sesuai dengan pedoman pada Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara No. 045/1187/BAPP-LIT/GUB Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka Perangkat Daerah menyusun Renstra tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dilantik serta prioritas daerah. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2021-2026, adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Posisi Visi untuk tahun 2021-2026 atau jangka menengah ini, dalam skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM Nasional tahapan ke III (2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Beberapa butir arahan lainnya berupa upaya untuk mewujudkan kondisi aman dan damai yang makin mantap; kehidupan yang makin demokratis; memantapkan kesadaran dan penegakan hukum; meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk kualitas sumber daya manusia; memantapkan pembangunan berkelanjutan; menguatkan daya saing perekonomian; meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang termasuk pengembangan infrastruktur perdesaan.

Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berubah:** Inti dari bagian visi berubah adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang berubah maju.

Berubah yaitu suatu kondisi kehidupan ada pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara mandiri.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

- b. Maju** yaitu suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.
- c. Sejahtera** yaitu suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, *ada 14 misi* yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai.
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan Kebangsaan.
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinnekaan di provinsi Kalimantan Utara.
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan.
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

1. 3 Data Umum Daerah

1. Letak Geografis Wilayah

Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki lokasi yang sangat Strategis dan menguntungkan karena daerahnya di lewati oleh alur pelayaran yang termasuk dalam kategori Alur laut kawasan Indonesia II (Alki II) yang sering di lewati oleh Kapal – kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke Alur pelayaran Internasional meliputi Kawasan Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura dan Negara – negara ASEAN, serta Negara – negara Asia Pasifik seperti Hongkong, China, Korea Selatan dan Jepang.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, tepatnya dengan bagian Sabah, Sarawak, dan Malaysia. Untuk daerah daratan terdekat + 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, yang juga merupakan ibukota Kabupaten Bulungan.

Provinsi Kalimantan Utara Berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Negara Bagian Sabah (Malaysia)
2. Sebelah Barat : Negara Bagian Sarawak (Malaysia)
3. Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur
4. Sebelah Timur : Laut Sulawesi

Luas wilayah administratif : 75.467.70 Km² terdiri dari :

1. Kabupaten Bulungan : + 13.925.72 Km²

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

2. Kabupaten Nunukan : + 13.841.90 Km²
3. Kabupaten Malinau : + 42.620.70 Km²
4. Kabupaten Tana Tidung : + 4.828.58 Km²
5. Kota Tarakan : + 25,80 Km²

Provinsi Kalimantan Utara saat pemekaran pada tanggal 25 Oktober 2012 saat UU No. 20 Tahun 2012 di tetapkan memiliki 38 kecamatan yang terdiri dari : 1. Kabupaten Bulungan : 10 Kecamatan 2. Kabupaten Nunukan : 9 Kecamatan 3. Kabupaten Malinau : 12 Kecamatan 29 4. Kabupaten Tana Tidung : 3 Kecamatan 5. Kota Tarakan : 4 Kecamatan Selama kurun waktu + 1 tahun sampai Oktober 2013 jumlah Kecamatan dan desa mengalami Pemekaran menjadi 47 Kecamatan dan 473 Desa/Kelurahan :

1. Kabupaten Bulungan : 10 Kecamatan dan 81 Desa/Kelurahan
2. Kabupaten Nunukan : 15 Kecamatan dan 240 Desa/Kelurahan
3. Kabupaten Malinau : 15 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan
4. Kabupaten tana Tidung : 3 Kecamatan dan 23 Desa/Kelurahan
5. Kota tarakan : 4 Kecamatan dan 20 Desa/Kelurahan

2. Gambaran Umum Demografis

Pada saat terbitnya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara berjumlah + 692.163 jiwa, dengan kepadatan penduduk + 10 jiwa/Km. Saat awal November 2015 setelah terbentuk dan berjalannya roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Selama Kurun Waktu 2,5 tahun sejak di tetapkannya UU No. 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 30.842 Jiwa atau sebesar 4,45% Jiwa sehingga jumlah penduduk menjadi sebanyak 732.005 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Bulungan : + 150.997 Jiwa
2. Kabupaten Nunukan : + 83.339 Jiwa
3. Kabupaten Malinau : + 220.257 Jiwa 30
4. Kabupaten Tana Tidung : + 28.439 Jiwa
5. Kota Tarakan : + 239.973 Jiwa

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah Heterogen (Majemuk) yang Terdiri dari berbagai suku. Secara Garis Besar penduduk Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari :

1. Suku Dayak

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

2. Suku Tidung
3. Suku Bulungan
4. Suku Banjar
5. Suku Bugis
6. Suku Jawa
7. Suku Sunda, NTT, NTB, dan lain – lain
8. Etnis China

3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara hasil Sensus Penduduk 2020 (september 2020) berjumlah 701.814 jiwa. Terjadi penambahan sebesar 177.158 jiwa bila dibandingkan tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun (2010-2020) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 2,86 persen. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk mencapai 5,19 persen bila dibandingkan dengan tahun 2000-2010. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 69,95 persen.

Sementara persentase penduduk lansia di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 3,39 persen. Terjadi peningkatan persentase penduduk lansia sebesar 2,41 persen bila dibandingkan dengan tahun 2010. Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara mencapai 112. Artinya, dari 100 orang perempuan, terdapat 112 orang penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, sebesar 34,59 persen total penduduk Provinsi Kalimantan Utara terkonsentrasi di Kota Tarakan, yaitu mencapai 242.786 jiwa.

4. Jumlah PNS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini Badan Penghubung Kalimantan Utara didukung oleh pegawai sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) orang dengan status kepegawaian 28 (Dua Puluh Delapan) orang PNS, dan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

57 (Lima Puluh Tujuh) orang Tenaga Kontrak (data per Januari 2021). Adapun pegawai yang ditempatkan di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta dan ada pula yang ditempatkan di wilayah Kota Tarakan.

Tabel 2.1

Klasifikasi PNS dan CPNS

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan tingkat eselon (Per Januari 2021)

NO.	ESSELON	JUMLAH PEGAWAI LAKI- LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
1.	III A	-	-	-	
2.	IV A	4	-	4	
3.	Non Esselon	17	7	9	
4.	Fungsional	-	-	-	
	JUMLAH	21	7	28	

Berikut ini disajikan data aparatur Badan Penghubung berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

Klasifikasi PNS dan CPNS

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan tingkat Pendidikan (Per Januari 2021)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA
1.	Doktoral / S-3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana / S-2	1		1
3.	Sarjana / S-1	10	3	13
5.	Diploma-III	4	2	6
7.	SLTA	6	2	8
	JUMLAH	21	7	28

(sumber data : Kepegawaian Badan Penghubung Januari 2021)

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA DAN
JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Kebutuhan Pegawai
1	2	3	4	5	6

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021					
	Badan Penghubung				
1	Kasubbag Tata Usaha				
2	Bendahara	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
3	Analisis Pengelola Keuangan	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
4	Analisis Perencanaan	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
5	Analisis Barang Milik Negara	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
6	Analisis Notifikasi	Subbagian Tata Usaha	7	1	1
7	Verifikator Keuangan	Subbagian Tata Usaha	6	1	1
8	Pengadministrasi Keuangan	Subbagian Tata Usaha	5	0	1
9	Pengadministrasi Umum	Subbagian Tata Usaha	5	3	4
10	Pengelola Barang Milik Negara	Subbagian Tata Usaha	6	2	1
11	Petugas Keamanan	Subbagian	3	0	0

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021					
		Tata Usaha			
12	Pengadministrasi Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha	5	0	1
13	Kasubid Hubungan Antar Lembaga				
14	Analisis Protokol	Subbidang Hubungan Antar Lembaga	7	1	2
15	Petugas Protokol	Subbidang Hubungan Antar Lembaga	6	0	3
16	Analisis Kerja Sama	Subbidang Hubungan Antar Lembaga	7	2	3
17	Kasubid Promosi dan Informasi				
18	Analisis Data dan Informasi	Subbidang Promosi dan Informasi	7	1	1

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

19	Pengelola dan Pariwisata	Promosi Informasi	Subbidang Promosi dan Informasi	6	2	1
20	Penyusun dan Kerjasama	Promosi	Subbidang Promosi dan Informasi	7	0	1
21	Analisis Informasi	Sistem	Subbidang Promosi dan Informasi	7	1	1
22	Kasubid Pelayanan dan Mess					
23	Analisis Pelayanan		Subbidang Pelayanan dan Mess	7	1	1
24	Pengolah Pelayanan	Data	Subbidang Pelayanan dan Mess	6	0	2
25	Pranata Jamuan		Subbidang Pelayanan dan Mess	5	0	2
26	Pengemudi VIP		Subbidang Pelayanan dan Mess	5	3	3
27	Pengemudi		Subbidang	3	0	0

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021					
		Pelayanan dan Mess			
TOTAL				22	33

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Penghubung 2021)

Rasio Menurut PNS Provinsi

	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin								
	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
Kabupaten	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Malinau	1847	1892	1830	1518	1607	1587	3365	3499	3417
Bulungan	3770	3937	3857	3258	3620	3578	7028	7557	7435
Tana Tidur	752	815	801	651	756	755	1403	1571	1556
Nunukan	2236	2257	2158	1600	1733	1703	3836	3990	3861
Tarakan	1545	1485	1424	1678	1635	1587	3223	3120	3011
Kalimantar	10150	10386	10070	8705	9351	9210	18855	19737	19280
Catatan:									
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2017	2017	2017
Malinau	1881	1544	3425
Bulungan	3631	3099	6730
Tana Tidung	773	664	1437
Nunukan	2332	1653	3985
Tarakan	1628	1734	3362

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	7500000.00	0.00	0.00			
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00			
3.6 Lainnya	54640546	0.00	0.00			
Jumlah	22325802	24206639	2610058536.94			
Catatan: Data APBD						
Sumber: Survei Statistik Keuangan Daerah						

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Balikpapan	348087898	202830841	467358936
Samarinda	37803231	54061490	497014451
Bontang	25061101	18655799	243241847
Malinau	290829283	392040684	777401398
Bulungan	608927782	782757737	100774000
Tana Tidung	58455346	432955235	-
Nunukan	285103651	187276858	504209959
Tarakan	450140305	390111866	526510000
Kalimantan Timur	-	-	-

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabup
Source : kaltim.bps.go.id

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	BOB OT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN
					FISIK		KEUANGAN			
					FIS (%)	TTB	KEU. (RP)	KEU. (%)	TTB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	5.06.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	3.499.731.369,0 0	32,6 8	99,60	13,93	3.370.385.668,0 0	96,30	31,47	129.345.701,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

1	5.06.01.1.06	Administrasi umum perangkat daerah	748.482.917,00	6,99	99,62	6,96	743.807.538,00	99,38	6,95	4.675.379,00
a.	5.06.01.1.06.04	<i>Penyedia bahan logistik kantor</i>	400.931.114,00	3,74	99,60	3,73	400.676.182,00	99,94	3,74	254.932,00
b.	5.06.01.1.06.05	<i>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</i>	97.300.803,00	0,91	99,60	0,90	97.255.322,00	99,95	0,91	45.481,00
c.	5.06.01.1.06.06	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	5.478.000,00	0,05	99,60	0,05	5.245.000,00	95,75	0,05	233.000,00
d.	5.06.01.1.06.09	<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	244.773.000,00	2,29	99,65	2,28	240.631.034,00	98,31	2,25	4.141.966,00
2	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.658.142,00	7,64	99,60	7,60	694.425.843,00	84,93	6,48	123.232.299,00
a.	5.06.01.1.08.02	<i>Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>	653.067.019,00	6,10	99,60	6,07	611.214.343,00	93,59	5,71	41.852.676,00
b.	5.06.01.1.08.03	<i>Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	164.591.123,00	1,54	99,60	1,53	83.211.500,00	50,56	0,78	81.379.623,00
3	5.06.01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.933.590.310,00	18,06	99,60	17,98	1.932.152.287,00	99,93	18,04	1.438.023,00
a.	5.06.01.1.09.02	<i>Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	1.752.200.310,00	16,36	99,60	16,30	1.751.223.788,00	99,94	16,35	976.522,00
b.	5.06.01.1.09.06	<i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	181.390.000,00	1,69	99,60	1,69	180.928.499,00	99,75	1,69	461.501,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

II	5.07.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	4.010.426.010,0 0	37,4 5	99,60	37,30	3.930.337.359,0 0	98,00	36,70	80.088.651,00
1	5.07.01.1.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28.593.644,00	0,27	96,90	0,26	24.394.387,00	85,31	0,23	4.199.257,00
a.	5.07.01.1.1.02	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	28.593.644,00	0,27	96,90	0,26	24.394.387,00	85,31	0,23	4.199.257,00
2	5.07.01.1.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.209.431.672,0 0	29,9 7	99,60	29,85	3.143.210.854,0 0	97,94	29,35	66.220.818,00
a.	5.07.01.1.02.01	<i>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	2.981.011.672,0 0	27,8 4	99,60	27,73	2.935.830.854,0 0	98,48	27,42	45.180.818,00
b.	5.07.01.1.02.02	<i>Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	228.420.000,00	2,13	99,66	2,13	207.380.000,00	90,79	1,94	21.040.000,00
3	5.07.01.1.06	Administrasi umum perangkat daerah	286.438.694,00	2,67	99,89	2,67	286.206.870,00	99,92	2,67	231.824,00
a.	5.07.01.1.06.01	<i>Penyediaan komponen instalasi/ listrik atau penerangan bangunan kantor</i>	71.133.694,00	0,66	99,60	0,66	71.116.870,00	99,98	0,66	16.824,00
b.	5.07.01.1.06.02	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	215.305.000,00	2,01	99,98	2,01	215.090.000,00	99,90	2,01	215.000,00
4	5.07.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	275.906.000,00	2,58	99,60	2,57	275.851.563,00	99,98	2,58	54.437,00
a.	5.07.01.1.08.01	<i>Penyedia jasa surat menyurat</i>	275.906.000,00	2,58	99,60	2,57	275.851.563,00	99,98	2,58	54.437,00
5	5.07.01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	210.056.000,00	1,96	99,60	1,95	200.673.685,00	95,53	1,87	9.382.315,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

a.	5.07.01.1.09..09	<i>Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	210.056.000,00	1,96	99,60	1,95	200.673.685,00	95,53	1,87	9.382.315,00
III	5.07.02	Program pelayanan penghubung	3.198.461.719,00	29,87	99,61	29,75	3.106.553.489,00	97,13	29,01	91.908.230,00
1	5.07.02.1.01	Pelaksanaan pelayanan penghubung	3.198.461.719,00	29,87	99,61	29,75	3.106.553.489,00	97,13	29,01	91.908.230,00
a.	5.07.02.1.01.01	<i>Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat</i>	1.078.865.000,00	10,07	99,60	10,03	1.031.840.459,00	95,64	9,64	47.024.541,00
b.	5.07.02.1.01.02	<i>Pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat</i>	1.976.984.000,00	18,46	99,60	18,39	1.936.120.999,00	97,93	18,08	40.863.001,00
c.	5.07.02.1.01.04	<i>Kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya</i>	142.612.719,00	1,33	99,72	1,33	138.592.031,00	97,18	1,29	4.020.688,00
JUMLAH			10.708.619.098,00	100,00	99,60	80,98	10.407.276.516,00	97,19	97,19	301.342.582,00

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun tujuan dan sasaran tahunan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, sesuai tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan/ fasilitasi kepada unsur pemerintah daerah, pimpinan, pejabat eksekutif/ legislatif kalimantan Utara di Jakarta dan sekitarnya.	Presentase unsur kepuasan pelayanan terhadap pejabat yang dilayani	100 %
2	Meningkatnya pengelolaan promosi daerah, potensi UKM,pentas seni budaya Kalimantan Utara di Jakarta dan sekitarnya.	Prosentase kepuasan pengunjung atas promosi,potensi UKM, dan pentas seni budaya Kalimantan Utara	100 %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

3	Meningkatnya Pelayanan Mess	Prosentase kepuasan tamu yang berkunjung dan menginap di Mess Kalimantan Utara di Jakarta	100%
---	-----------------------------	---	------

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:

- 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
- 2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Tabel 3.2

Capaian Program Layanan Penghubung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	1. Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung. 2. Jumlah Fasilitas	100 pelayanan 50 fasilitas (total 150 kegiatan)
	Promosi dan	1. Jumlah kegiatan	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021				
2.	pengelolaan	Ajungan	promosi daerah	11 promosi
	Kalimantan	Utara	di	2. Pengelolaan Anjungan
	TMII		Kalimantan	Utara
			di	1 anjungan
			TMII	(total 12 kegiatan)
	Pelayanan	Penunjang	Jumlah orang yang dilayani	
3.	Perangkat	Daerah		100 orang
	(pelayanan mess)			

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerint ahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Outco me)/Ke giatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realis asi Capai an Kinerj a Renst ra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Tingk at Capai an Kinerj a dan Realis asi Angg aran Renja SKPD Tahu n 2021 (%)	
										I		II		III		IV					
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K
1	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 7+8+9+10		13 = 12/7*100	
								10.70													

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

										8.619.098													
	PROGR AM PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH PROVIN SI									3.499.731.369			527.817.007		1.253.302.013		609.050.926		980.215.722		3.370.385.668		
1	Administ rasi Umum Perangk at Daerah	Cakup an layana n admini strasi perkan toran						100,00		748.482.917			174.818.642		271.151.088		118.298.260		179.539.548		743.807.538		
	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyedi aan bahan logistik kantor	60	bulan	2.080.000.000,00			12	bulan	400.931.114,00	3,00	bulan	129.631.720,00	3,00	166.522.616,00	3,00	13.378.152	3,00	91.143.694	12,00	400.676.182	100,00	99,94

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Penyedia an barang cetakan dan penggan daan	Jumlah bulan penyedi aan barang cetakan dan pengga ndaan	60	bu la n	556.903.018,00				12	bul an	97.300.803,00	3,00	bul an	8.253.000,00	3,00	53.960.672,00	3,00	18.971.955	3,00	16.069.695	12,00	97.255.322	100,00	99,95
Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ng-undanga n	Jumlah bahan bacaan dan peratur an perund ang undang an yang disedia kan	100	do k	92.200.000,00				18	do ku me n	5.478.000,00	2,00	do ku me n	130.000,00	3,00	1.120.000,00	7,00	390.000	3,00	3.605.000	15,00	5.245.000	83,33	95,75
Penyelen ggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulta	Jumlah rapat rapat koordin asi dan konsult	225	ka li	1.630.000.000,00				45	kali	244.773.000,00	5,00	kali	36.803.922,00	5,00	49.547.800	19,00	85.558.153	9,00	68.721.159	38,00	240.631.034	84,44	98,31

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

	si SKPD	asi SKPD																					
														0,00							Rata-rata capaian kinerja (%)	91,94	98,49
														0,00							Predikat kinerja	S T	S T
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah								817.658.142			99.843.248,00		197.362.692,00		139.631.854,00		257.588.049,00		694.425.843,00		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan / waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	60	bulan	4.315.000.000,00			12	Bulan	653.067.019,00	3,00	Bulan	99.843.248,00	3,00	197.362.692,00	3,00	139.631.854,00	3,00	174.376.549,00	12,00	611.214.343,00	100,00	93,59

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

		air dan listrik																						
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125	unit	7.664.545.759,00				25	unit	164.591.123,00	0,00	unit	-	0,00	0	0,00	0	18,00	83.211.500	18,00	83.211.500	72,00	50,56
														0,00						Rata-rata capaian kinerja (%)	86,00	72,07		
														0,00						Predikat kinerja	T	S		
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah									1.933.590.310,00			253.155.117,00		784.788.233,00		351.120.812,00		543.088.125,00		1.932.152.287,00		

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

		daerah																						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	60	bulan	15.282.328.000,00				40	unit	1.752.200.310	5,00	unit	253.155.117,00	16,00	738.831.734	9,00	284.937.812	8,00	474.299.125	38,00	1.751.223.788	95,00	99,94
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang diperbaiki	125	unit	718.640.000,00				40	unit	181.390.000,00	0,00	unit	-	11,00	45.956.499	9,00	66.183.000	14,00	68.789.000	34,00	180.928.499	85,00	99,75
														0,00							Rata-rata capaian kinerja (%)	90,0	99,9	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

																					0	8		
													0, 0 0							Predikat kinerja	T	S T		
	PROGR AM PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH PROVIN SI									4.010. 426.0 10			635.5 14.47 6	1.090 .496. 261		992.4 60.78 3		1.187 .471. 452		3.905. 942.9 72				
	Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah									28.59 3.644			0	3.520 .000		0		20.87 4.387		24.39 4.387				
	Penyusu nan Dokumen Perencan	Jumlah dokum en perenc	2 5	do k	311.76 0.018, 00				5	do ku me n	28.59 3.644	2, 0 0	do ku me n	-	1, 0 0	3.520 .000, 00	0, 0 0	0	2, 0 0	20.87 4.387	5, 00	24.39 4.387	10 0, 00	8 5, 3

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

	aan Perangka t Daerah	anaan perang kat daerah yang tersusu n																					1
														0, 0 0							Rata-rata capaian kinerja (%)	10 0, 00	8 5, 3 1
														0, 0 0							Predikat kinerja	S T	T
	Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	Cakup an layana n admini strasi perang kat daerah								3.209. 431.6 72			623.2 23.31 3		903.2 88.99 6		752.8 27.61 1		863.8 70.93 4		3.143. 210.8 54		
	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah bulan penyedi aan Gaji	6 0	bu la n	16.275 .669.9 15,00				12 bul an	2.981. 011.6 72,00	3, 0 0	bul an	623.2 23.31 3,00	3, 0 0	852.2 28.99 6,00	3, 0 0	695.7 07.61 1	3, 0 0	764.6 70.93 4	12 ,0 0	2.935. 830.8 54	10 0, 00	9 8, 4 8

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

		dan tunjang an ASN																						
	Penyedia an Administr asi Pelaksan aan Tugas ASN	Jumlah bulan layanan adminis trasi bagi ASN	6 0	bu la n	1.250. 920.00 0,00				12	bul an	228.4 20.00 0	3, 0 0	bul an	-	3, 0 0	51.06 0.000 ,00	3, 0 0	57.12 0.000	3, 0 0	99.20 0.000	12 ,0 0	207.3 80.00 0	10 0, 00	9 0, 7 9
														0, 0 0							Rata-rata capaian kinerja (%)	10 0, 00	9 4, 6 4	
														0, 0 0							Predikat kinerja	S T	S T	
	Administ rasi Umum Perangk at daerah	Cakup an Layana n Admini strasi Perang kat Daerah									286.4 38.69 4			3.646 .940	80.84 6.450		56.56 4.180		145.1 49.30 0		286.2 06.87 0			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	100	unit	347.000.000,00				20	unit	71.133.694,00	4,00	unit	3.646.940,00	7,00	34.046.450,00	4,00	12.964.180	4,00	20.459.300	19,00	71.116.870	95,00	99,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	125	unit	305.000.000,00				25	unit	215.305.000,00	0,00	unit	-	5,00	46.800.000,00	4,00	43.600.000	14,00	124.690.000	23,00	215.090.000	92,00	99,90
															0,00						Rata-rata capaian kinerja (%)	93,50	99,9	

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

																				Predikat kinerja			4	
														0,00								S T	S T	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah								275.906.000			8.644.223,00		104.647.815,00		144.345.992,00		18.213.533,00		275.851.563,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	500	lembar	1.932.134.000,00				100	lembar	275.906.000	35,00	lembar	8.644.223,00	20,00	104.647.815,00	32,00	144.345.992	11,00	18.213.533	98,00	275.851.563	98,00	99,98
															0,00						Rata-rata capaian kinerja (%)	98,00	99,98	
															0,00						Predikat kinerja	S T	S T	
	Pemeliharaan Barang	Terpeliharanya								210.056.00			-		1.713.000,		38.723.000		160.237.68		200.673.68			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah daeah								0					00		,00		5,00		5,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung /bangunan	60	bulan	1.447.450.000,00				12	bulan	210.056.000	3,00	bulan	-	3,00	1.713.000	3,00	38.723.000	3,00	160.237.685	12,00	200.673.685	100,00	95,53
														0,00						Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	95,53		
														0,00						Predikat kinerja	ST	ST		
	PROGR AM PELAYA									3.198.461.7			483.172.70		955.947.28		735.305.16		932.128.32		3.106.553.4			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

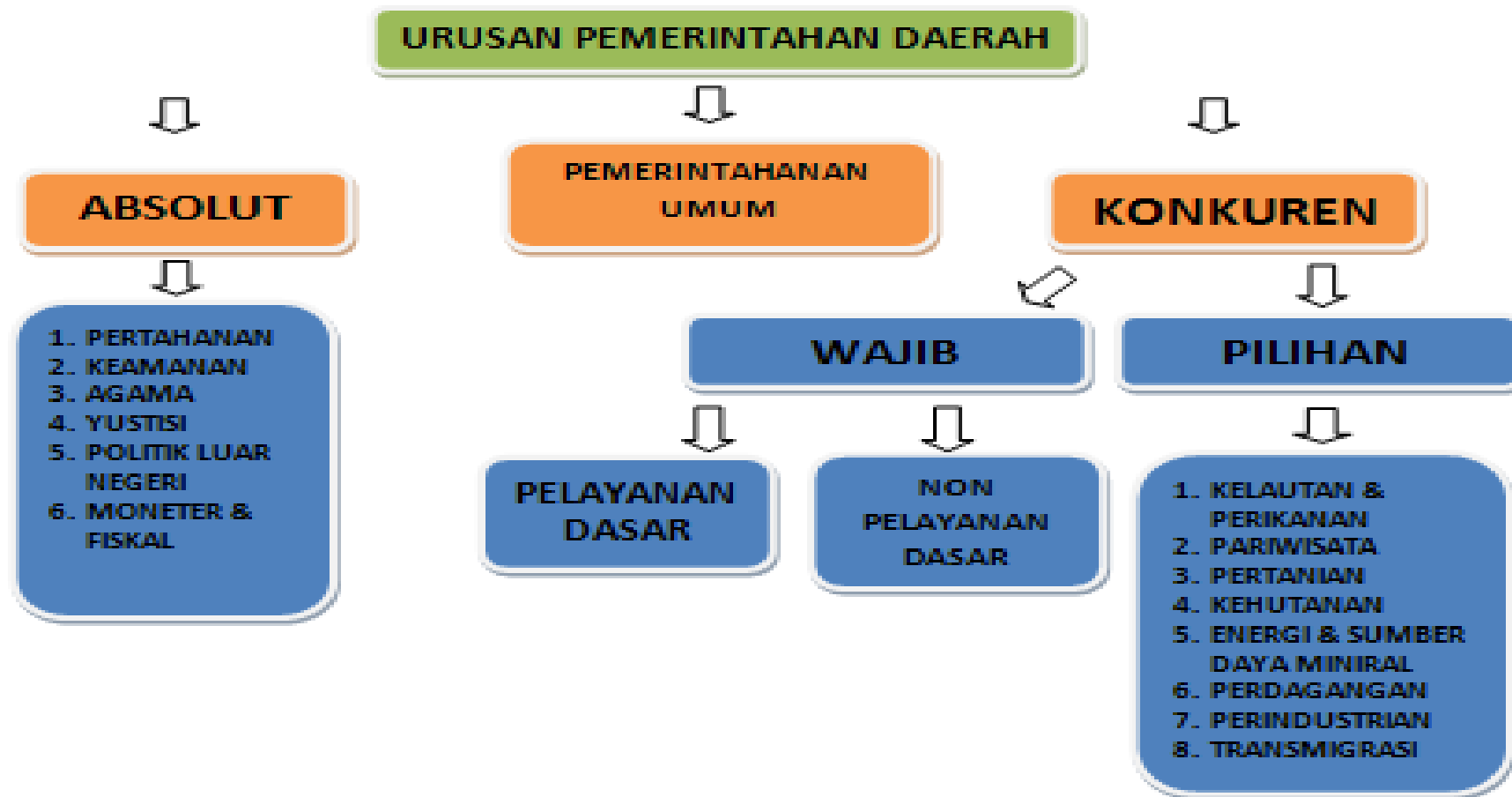
	NAN PENGHUBUNG									19			6,00		6,00		9,00		8,00		89,00			
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung									3.198.461.719			483.172.706,00		955.947.286,00		735.305.169,00		932.128.328,00		3.106.553.489,00			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah pelayanan bagi aparatur dan masyarakat	450	kali	10.303.806.734,00				150	kali	1.078.865.000,00	47,00	kali	186.396.700,00	40,00	383.167.793,00	37,00	221.370.038	19,00	240.905.928	143,00	1.031.840.459	95,33	95,64
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah pelayanan bagi aparatur dan masyarakat	500	orang	11.434.569.056,00				100	orang	1.976.984.000,00	32,00	orang	296.178.506,00	23,00	540.966.493,00	20,00	473.728.000	20,00	625.248.000	95,00	1.936.120.999	95,00	97,93

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah pameran produk seni budaya	60	kali	547.000.000,00				12	kali	142.612.719	2,00	kali	597.500,00	3,00	31.813.000	3,00	40.207.131	2,00	65.974.400	10,00	138.592.031	83,33	97,18
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	91,22	96,92	
																				Predikat kinerja	ST	ST	

Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar





Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Tidak Ada	Badan Penghubung							
2.									

Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Tidak Ada	Badan Penghubung							
2.									

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

3.1 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.Recofusing Anggaran APBD 2021 di lakukan dalam rangka penanganan Covid 19	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	Memberikan acuan kepada Perangkat daerah dalam menyelenggarakan Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2021
2.	Perubahan RKPD Tahun 2020, merupakan tindaklanjut dari berubahnya perencanaan dan penganggaran untuk perubahan target kegiatan yang berubah akibat recofusing anggaran penanganan Covid-19	Pergub TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	Memberikan acuan kepada Perangkat daerah dalam melaksanakan target kegiatan, program dan sasaran daerah.

3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daera terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

NO.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	penyusunan anggaran dan pelaporan Pemprov Kaltara wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalam refocusing anggaran agar dapat dilakukan pembahasan bersama DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap anggaran	Falam Dokumen RKPD 2021 menyebutkan Prioritas 1 adalah Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan menengah dan Khusus,pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan Lingkungan. Yang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltara	Melakukan pendampingan secara intensif kepada perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana kerja (renja) perangkat daerah mengacu pada RPJMD dan RKPD

Keterangan :

Target adalah hasil yang dicapai pada tingkat *outcome* yang segera terlihat setelah *output* dicapai (*immediate outcome*).

Contoh: pembangunan jalan, *output*nya adalah: panjang jalan yg terbangun, *outcomenya* adalah peningkatan social

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 yang digunakan untuk Belanja Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.708.619.098,00 telah terealisasi sebesar Rp. 10.407.276.516,00 atau sebesar 97,11% dan realisasi fisik mencapai 99,60 %.
2. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 menjadi masukan terhadap penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021.

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2021 antara lain disebabkan adanya efisiensi belanja kegiatan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Virus Covid-19 dan kendala teknis lainnya. Solusi upaya peningkatan kinerja untuk perencanaan tahun 2022, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara akan lebih cermat dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan Efisiensi anggaran sehingga output dan outcome dapat tercapai sebagaimana target dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan LKPj Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dimaksudkan sebagai upaya pertanggungjawaban hasil/capaian kinerja instansi secara akuntabel dalam rangka mewujudkan transparansi publik.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan LKPj Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara adalah :

- a. Sebagai bahan akuntabilitas bagi Tim Gubernur/Wakil Gubernur dalam mengevaluasi program/ kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai dengan hasil/capaian kinerja selama Tahun 2021.
- b. Sebagai bahan dalam pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
- c. Sebagai salah satu indikator dalam menganalisa tingkat kemajuan kinerja berdasarkan realisasi fisik dan keuangan berkaitan dengan kesesuaiannya dengan rencana strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026.

2. GAMBARAN ORGANISASI

1. Tugas

Badan Penghubung adalah merupakan unsur penunjang lain, untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jakarta

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa **"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara"**. Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : **"Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang"**.

Tugas Pokok Badan Penghubung adalah:

"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta"

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi lain Provinsi Kalimantan Utara., Badan Penghubung dibentuk sebagai Badan Daerah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*tecnostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara mempunyai sejumlah fungsi sesuai dengan Pergub Nomor 23 Tahun 2016 tentang dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi lain Provinsi Kalimantan Utara., yaitu:

Fungsi Badan Penghubung adalah:

1. Perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung;
3. Penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga;
4. Penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta;
5. Pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah;
6. Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh Kepala Badan

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Pelayanan, Seksi Promosi dan Informasi.

3. Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi lain Provinsi Kalimantan Utara Bab II Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Fungsi Penunjang Lain. Bagian Kedua, Paragraf 1 Pasal 6

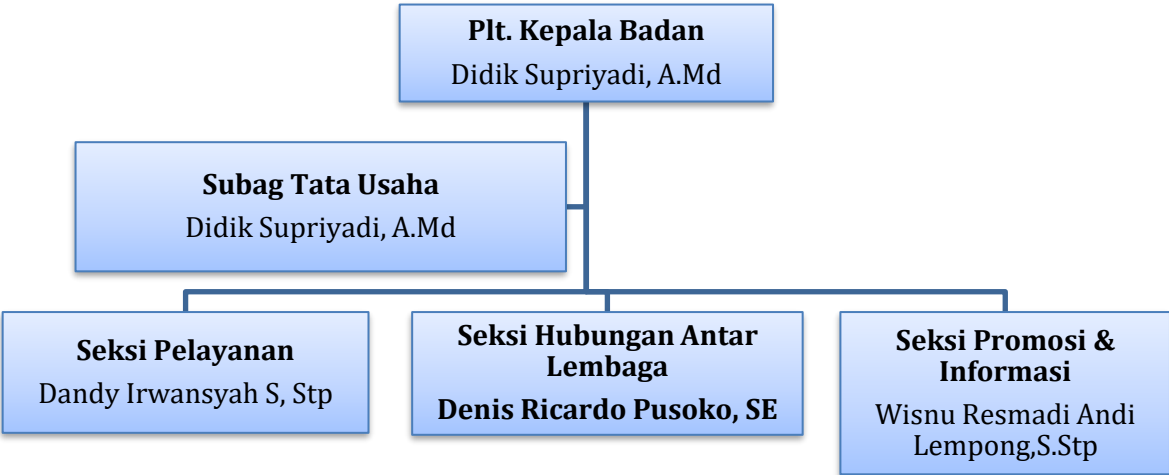
- 1) Badan Penghubung merupakan unsur penunjang lain Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut Pasal 9 Peraturan Gubernur diatas Susunan Organisasi Badan Penghubung terdiri atas:

- a) Kepala Badan;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- d) Subbidang Promosi dan Informasi;
- e) Subbidang Pelayanan;
- f) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tersebut dapat disajikan sebagaimana di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara



3. ASPEK STRATEGIS

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta. Badan Penghubung berlokasi di Jl. Kramat II, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara menempati gedung Luas gedung/ kantor dengan luas 700 m2 dengan sistem sewa per tahun. Dilihat dari lokasi/ letak kantor berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*). Aspek-aspek strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 1. Aspek Strategis Badan Penghubung

No	Indikator	Aspek Strategis	Keterangan
1	Letak/ Posisi	Di jalur strategis, di Jl. Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat	Dekat dengan Istana Negara dan Komplek kementerian dan Shutle transportasi.
2	Sarana dan Prasarana	Kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan Badan, dan peralatan rumah tangga yang cukup memadai	Dalam melayani pejabat daerah yang betugas di Jakarta dan pelaksanaan Tupoksi lainnya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021			
3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak dan elektronik serta website Badan Penghubung serta Instagram	Melalui kerjasama dengan TV swasta nasional dan pihak media lain selain itu promosi dan publikasi kegiatan pimpinan daerah dan sport tourism
4	Pelaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi berdekatan dengan kementerian/ lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan
5	Sosial Budaya	Komunikasi yang intens dengan kegiatan seni festifal	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta promosi

Gambaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan analisa SWOT yakni *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman/ tantangan) adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,;
- b. Dukungan Sumber Daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan dengan lokasi

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

strategis di pusat kota dengan perlengkapan dan peralatan yang cukup memadai, anggaran dll);

- c. Besarnya potensi daerah yang dapat dipromosikan kepada investor baik dalam maupun luar negeri;
- d. Adanya Media Sosial Badan Penghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah Kabupaten/Kota serta media publikasi.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah situasi kurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat/gagal mencapai sasarannya. Kelemahan yang bisa menjadi penghambat untuk mencapai tujuannya antara lain:

- a. Status eselonering yang masih terbatas (esselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan strategis;
- b. Penjabaran Tugas masih banyak dirangkap antar pegawai karena terbatasnya SDM aparatur;
- c. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kab/Kota) yang menyebabkan susahny mendapatkan data atau bahan-bahan promosi yang memadai tentang industri, kerajinan, kesenian dan sebagainya dari daerah secara tepat dan akurat sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi pada pihak yang membutuhkan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan di pemerintah daerah yang memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

- a. Kondisi letak yang strategis memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat,

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

- Kementrian dan Lembaga yang ada di Jakarta maupun dengan perantau Kaltara di Indonesia;
- b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;

4. Ancaman/Tantangan (*Threats*)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- a. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah
- b. Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (Badan) sehingga eksistensi Badan Penghubung menjadi berkurang
- c. Dinamika sosial politik

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKPj Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 berdasarkan Permenpan Nomor 29 tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN	: mengenai gambaran umum SKPD dan sekilas pengantar
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	: memuat Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	: memuat Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja, Analisis Pencapaian Sasaran Startegis, dan Akuntabilitas Keuangan, realisasi fisik dan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

alam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar D efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Badan Penghubung periode Tahun 2021 -2026 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik di internal Badan Penghubung maupun dengan Dinas/ Instansi terkait.

Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Badan Penghubung selama lima tahun (2021-2026). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Renstra Badan Penghubung 2021 - 2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara 2021-2026. Sesuai dengan reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*), dokumen Renstra dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga akuntabilitas pelaksana kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi.

Secara ringkas substansi Renstra tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara selaku unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat mempunyai visi:

“Badan Penghubung dengan pelayanan prima, kinerja yang unggul dan mengembangkan inovasi”

Visi Badan Penghubung diatas mempunyai beberapa makna sebagai berikut:

- a. **Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;** *representatif* atau perwakilan dari Pemerintah Daerah di Jakarta, yang memiliki peran strategis dalam rangka pelayanan prima dan fasilitasi hubungan antar lembaga khususnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dalam rangka pelayanan promosi dan informasi pembangunan daerah Kalimantan Utara di Jakarta.
- b. **Kinerja Unggul;** sosok aparatur yang pikiran dan tindakannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu dilandasi dengan akhlak dan etika perilaku yang baik, serta keterampilannya, dengan ciri utamanya menghargai waktu, disiplin, peka dan tanggap, berpikir cermat dan bertindak cepat, serta tepat dan bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi.
- c. **Inovasi;** mendasarkan pada prinsip-prinsip inovatif, *good and clean governance*, prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan “pencitraan pelayanan” yang **Ramah, Empati, Sigap, Kenangan (RESK)**.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Sedangkan misi yang diemban oleh Badan Penghubung dalam pencapaian visi tersebut diatas, adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan public;
2. Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah;
3. Meningkatkan Promosi, Publikasi dan informasi mengenai potensi daerah;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kelancaran dan ketepatan pengurusan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat , perwakilan asing dan Lembaga Non Pemerintah;
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Sasaran

Adapun Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah;
2. Terlaksananya promosi potensi daerah Kalimantan Utara;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, transparan dan partisipatif;
4. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pimpinan daerah selama pelaksanaan tugas di luar Kalimantan Utara.

4. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara maka diperlukan strategi dan kebijakan yang

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Strategi dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di daerah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara dihasilkan dari hasil analisis strategis yaitu S – O (*Strengths–Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, SKPD Provinsi Kalimantan Utara dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran.
- b. Aktualisasi kebijaksanaan pelayanan dalam menciptakan pelayanan prima;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam menciptakan SDM yang berkualitas;
- d. Revitalisasi penyajian data informasi pembangunan yang akuntabel dan akurat.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, serta OPD di Jakarta;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

- 3. Meningkatkan kapasitas serta kualitas sarana dan prasarana dalam rangka penyebaran informasi Kantor Penghubung;
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan;

Berdasarkan visi misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang koordinasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Program Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang disusun untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Penghubung

5. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, sesuai tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.	150 kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

2	Promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	12 kali
3	Pelayanan mess	Jumlah tamu yang mendapat pelayanan	60 orang

Penetapan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran strategis RPJMD, sebagai implementasi dari pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana daftar berikut ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.
2.	Promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII

3. Pelayanan mess
- Jumlah tamu yang mendapat pelayanan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, dengan mempertimbangkan segenap sumber daya telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3.Rencana Kinerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	3. Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung. 4. Jumlah Fasilitas	100 pelayanan 50 fasilitas (total 150 kegiatan)
2.	Promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	3. Jumlah kegiatan promosi daerah 4. Pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	11 promosi 1 anjungan (total 12 kegiatan)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

	Pelayanan	Penunjang	Jumlah orang yang dilayani	
3.	Perangkat	Daerah		60 orang
	(pelayanan mess)			

C. PENETAPAN KINERJA

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di tandatangani oleh Gubernur. Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2018 mengacu kepada Renstra SKPD Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 yang diturunkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai dasar untuk mengukur kinerja Badan Penghubung untuk Tahun 2018.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penghubung Tahun 2018 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Mempertimbangkan sumberdaya, telah ditetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2018 sebagai berikut:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / kegiatan	Anggaran
o					
1	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	Jumlah kegiatan pelayanan oleh Penghubung.	150 kegiatan	Program Peningkatan Manajemen Kerja 1. Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat Daerah/ Pusat	2.783.600.000,00
2	Promosi dan pengelolaan	Jumlah kegiatan dan daerah	12 kegiatan	Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang	178.500.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Anjungan Kalimantan Utara di TMII	Anjungan Kalimantan Utara di TMII	Investasi 1. Promosi Anjungan Kaltara di TMII	
3 Pelayanan mess	Jumlah tamu yang mendapat pelayanan 60 orang	Program Peningakatan Manajemen Kerja 1. Pelayanan Mess	
		294.960.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai Atujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Penghubung Tahun 2018.

Target capaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Target Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.	150 kegiatan
2	Promosi dan pengelolaan Ajungan Kalimantan Utara di TMII	Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	12 kegiatan
3.	Pelayanan mess	Jumlah tamu yang mendapat pelayanan	60 orang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Amat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53%-68%	Cukup
4	<53%	Gagal

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2018 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan
Utara
Tahun 2018

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta	Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.	150 kegiatan	176 kegiatan	117 %
2	Promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	12 kegiatan	1 Anjungan berdiri, 3 promosi anjungan TMII, dan 2 promosi dlm DKI Jakarta (total 6 kegiatan)	50 %
3	Pelayanan mess	Jumlah tamu yang mendapat pelayanan	60 orang	37 pelayana n pejabat, tamu,pes erta rapat	61%

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	%
1	Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.	Jumlah kegiatan terhadap oleh Badan Penghubung.	kegiatan pelayanan Badan	100 orang	147 orang	147%
2	Promosi dan pengelolaan Ajungan Kalimantan Utara di TMII	Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Ajungan Kalimantan Utara di TMII	kegiatan daerah dan kegiatan Ajungan Kalimantan Utara di	3 kegiatan	3 kegiatan	100 orang
3	Pelayanan mess	Jumlah tamu yang mendapat pelayanan	yang pelayanan	60 orang	n/a pelayanan mess belum maksimal	Belum dapat diukur

Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 tergolong **Baik** (rata-rata di atas 76 %).

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berikut di sajikan hasil pengukuran kinerja beserta analisa Pencapaian Kinerja per sasaran Strategis :

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021



Sasaran Strategis 1

Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.

Badan Penghubung selaku SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jakarta bertugas untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Non-Pemerintah yang berada di luar Provinsi Kalimantan Utara.

Sasaran “Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta”. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung., dimana dalam upaya pencapaiannya didukung **Program Peningkatan Manajemen Kerja** dengan kegiatan pendukung yaitu Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat Daerah/ Pusat

Capaian kinerja Badan Penghubung dalam rangka memfasilitasi koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.

		Capaian Kinerja	
No	Indikator	2018	
		Target	Realisasi

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

1	Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.	150 kegiatan	176 kegiatan
---	---	--------------	--------------

1. Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Indikator Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung. tergolong **Amat Baik** (realisasi 117 %) melebihi target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja Indikator dapat dilihat dari hasil kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung pada Tahun 2018 dengan *taget 150 kali terlaksananya sebanyak x kali* dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$x\% = \frac{176\ kali}{150\ kali} \times 100\%$$

Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah di Jakarta Badan Penghubung mempunyai fungsi sebagai Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan diluar Kalimantan Utara yang diwujudkan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah daerah. Kegiatan ini memfasilitasi segala kebutuhan protokoler pejabat daerah yang bertugas diluar wilayah Kalimantan Utara.

Tabel 3.6 Realisasi Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada pejabat daerah, SKPD juga pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta.sampai Tahun 2018

Uraian


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

		2015		2016		2017		2018	
				T	R	T	R	T	R
Jumlah kegiatan terhadap pelayanan oleh Badan Penghubung.	- -	50	76	70	81	150	170	kali	kali

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara baru mengukur tingkat kepuasan pelayanan terhadap Pimpinan Daerah yang melaksanakan Tugas di Jakarta dan Luar Kalimantan Utara Baru dilakukan mulai pada Tahun 2016 sehingga tidak terdapat data pada tahun-tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan realisasi kinerja pada tahun 2018 Badan Penghubung akan melakukan perbaikan kinerja dengan menerapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap standar operasional prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, serta akan mengikutsertakan staf Badan Penghubung dalam kegiatan Bimtek/Pelatihan peningkatan kualitas pelayanan.



Sasaran Strategis 2

Promosi dan pengelolaan Ajungan Kalimantan Utara di TMII

Kalimantan Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan sumber daya melimpah baik di bidang kesenian, kebudayaan, pariwisata, kuliner, dan bidang-bidang lainnya. Sumber daya alam Kalimantan Utara yang sangat produktif menjadikan sektor

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

pertanian, pertambakan, dan perikanan memiliki potensi yang baik jika dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Dalam rangka menyebarluaskan informasi dalam pengembangan/ sarana promosi sumber daya/ potensi yang ada di Kalimantan Utara, Badan Penghubung telah melaksanakan promosi potensi daerah Kalimantan Utara dalam berbagai media dan kegiatan. Pada sasaran strategis Promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII diukur melalui indikator yaitu Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII

Tabel 3.7. Realisasi Promosi dan pengelolaan Ajungan Kalimantan Utara di TMII tahun 2018

No	Indikator	Capaian Kinerja	
		2018	
		Target	Realisasi
1	Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII	12	6

1. Jumlah kegiatan promosi daerah dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel 3.7, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Indikator jumlah aktivitas promosi daerah Kalimantan Utara yang terlaksana tergolong **Sedang** (*realisasi 50 %*). Pengukuran kinerja Indikator Jumlah aktivitas promosi daerah Kalimantan Utara yang terlaksana dapat dilihat dari aktivitas promosi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{6}{12} \times 100\%$$

Adapun promosi potensi daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

- a. Kalimantan Utara Expo 2018 di Ulang tahun TMII
Kegiatan ini merupakan ajang promosi potensi daerah baik dari segi sumber daya alam, wisata maupun peluang investasi di Daerah Kalimantan Utara yang berbentuk Expo. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana Promosi bagi potensi unggulan daerah, peluang investasi serta promosi Seni dan Budaya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Kalimantan Utara dan dilaksanakan dengan mengangkat produk kreatif.

b. Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di JCC Jakarta

Kegiatan Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di JCC Jakarta adalah untuk mempromosikan Seni Budaya daerah Kalimantan Utara agar dikenal masyarakat luas baik dari dalam maupun Luar Negeri. Kegiatan Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di Jakarta berupa Promosi Seni dan Budaya kepada Masyarakat luas yang ada di Jakarta, dimana penyelenggaraannya bekerjasama dengan Penyelenggara Event terkait. Pada tahun 2018 dilaksanakan di Lapangan JCC pada 26 s.d 30 september bersamaan dengan event dekranasda.

c. Berbagai macam kegiatan di TMII



Sasaran Strategis 3

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Pelayanan Mess

Mobilitas dan acara terkait kedinasan di Ibukota sangatlah tinggi, mulai dari Staff OPD, Pejabat maupun Masyarakat Kalimantan Utara yang mengadakan kegiatan di Jakarta. Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan dan fasilitasi bagi mereka maka pelayanan mess sangatlah penting dan member arti penting bagi kelancaran tugas kedinasan.

Tabel 3.8. Realisasi Pelayanan Mess Tahun 2018

No	Indikator	Capaian Kinerja	
		2018	
		Target	Realisasi
1	Jumlah tamu yang mendapat pelayanan	60	37

Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penghubung dalam rangka meningkatkan Sinergitas, Koordinasi dan Pembinaan terhadap para tamu dari Kalimantan Utara pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah tamu yang mendapat pelayanan

Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Indikator jumlah aktivitas koordinasi dengan perantau Sumatera Barat yang terlaksana tergolong **Baik** (realisasi 61 %). Pengukuran kinerja Indikator Jumlah aktivitas koordinasi dengan perantau yang terlaksana daapt diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{37}{60} \times 100\%$$

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021
REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 per Program/Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.698.206.000	4.678.298.327	69.84
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.			
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.			
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	170.000.000	159.189.340	93.64
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	655.000.000	228.120.211	34.83
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	665.000.000	520.709.544	78.30
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor.			
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	160.000.000	89.304.400	55.82
8. Penyediaan alat tulis kantor.	2.184.382.000	1.595.430.000	73.04
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	248.800.000	182.134.819	73.21
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	250.000.000	114.632.634	45.85
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	240.000.000	184.474.461	78.86
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	117.800.000	95.814.640	81.34
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Peraturan Perundang-Undangan.

14.	Penyediaan makanan dan minuman.	100.000.000	50.534.000	50.53
15.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	393.200.000	197.407.898	50.21
16.	Rapat-rapat koordinasi,pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah.	170.000.000	51.550.781	30.32

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.		60.000.000	26.422.698	44.04
		624.024.000	542.104.218	86.87
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.			
2.	Pengadaan Mebeleur.	460.000.000	459.957.433	99.99
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.			
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	200.000.000	180.511.250	90.26

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		4.610.500.000	3.845.076.106	83.40
1.	Pendidikan dan pelatihan formal			

IV. Program Peningakatan Manajemen Kerja				
1.	Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat Daerah/ Pusat	1.960.000.000	1.831.738.000	93.46
2.	Pelayanan Mess	200.000.000	199.116.500	99.56
		650.500.000	488.786.750	75.14

V. Program Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi		1.800.000.000	1.325.434.856	73.64
--	--	---------------	---------------	-------

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

- 1. Promosi Anjungan Kaltara di TMII
- 2. Promosi Dalam Daerah DKI Jakarta

200.000.000 54.425.683 27.21

3.078.560.000 2.647.827.002 86.01

2.783.600.000 2.484.614.024 89.26

294.960.000 163.212.978 55.33

293.500.000 172.510.902 58.78

178.500.000 135.342.418 75.82

115.000.000 37.168.484 32.32

TOTAL 17.021.373.377 13.493.757.916 79.28

1. Realisasi Setiap Program dan Kegiatan

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Pagu : 170.000.000

Realisasi: 159.189.340

Persentase kinerja : 93.64

Jumlah penyediaan jasa surat menyurat” tingkat capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan yakni 97,50 %. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi OPD yang berbentuk arsip. Indikator hasil daeri kegiatan ini adalah tersedianya dokumen surat menyurat. Rata-rata jumlah surat menyurat pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 80 surat. dari target tersebut pada tahun 2018 rata-rata surat mencapai lebih dari seribu atau sekitar 72 lembar.



b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Pagu : 655.000.000

Realisasi: 228.120.211

Persentase kinerja : 34.83

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. tingkat capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan yakni 34.83 %. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan kegiatan rutin yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi rumah tangga rutin. Indikator hasil daeri kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Daya Air dan Listrik. Rata-rata jumlah laporan jasa pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 12 bulan.

- c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Pagu : 655.000.000

Realisasi: 520.709.544

Persentase kinerja : 78.30

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor” tingkat capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan yakni 78.30 %. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kegiatan komunikasi intern instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada peralatan dan perlengkapan kantor. Indikator hasil daeri kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan.



- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pagu : 160.000.000

Realisasi: 89.304.400

Persentase kinerja : 55.82

“Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional” dengan anggaran 160.000.000,00 tingkat ketercapaiannya 55.82 %. Kegiatan ini selain penyediaan jasa perizinan juga terdapat kegiatan penilaian/appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik pemerintah.yang meliputi penyediaan biaya perawatan, pajak STNK, dan servis kendaraan Dinas/Operasional Biro Kesejahteraan RakyatPekerjaan yang telah tercapai atas target kinerja.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Dalam perealisasi target ini, tidak ditemukan kendala atau hambatan yang berarti. Hal ini demi kelancaran kegiatan operasional harian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam program kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional ini pagu anggaran sebesar 160.000.000,00 , realisasi keuangan sebesar 55.82, sisa dana 70.695.600,00 . Secara umum kegiatan ini berjalan lancar.

e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pagu : 2.184.382.000,00

Realisasi : 1.595.430.000,00

Persentase Kinerja : 73.04

Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.”Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk mengukur tingkat capaian pembayaran jasa administrasi keuangan, Penunjang bantuan sarpras provinsi dengan kegiatan sebagai berikut; Honorarium pengelolaan keuangan daerah bulan Januari-Desember yang terdiri dari Belanja Pegawai/ Honorarium PNS/ Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah. (Pembayaran Honor bagi Pengelola Keuangan OPD selama 12 bulan) dengan target output terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan, dan terget outcome meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Pada tahun 2018 indeks yang ditetapkan sebesar 70%. Hasil Yang Dicapai : Pembayaran Honor Pengelola Keuangan OPD selama 12 bulan dengan capaian indikator kerja sebesar 73.04 %.

Dalam hal ini telah terpenuhinya target yang ditetapkan. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan pagu anggaran sebesar 2.184.382.000,00 terealisasi sebesar 1.595.430.000,00 atau 73.04 % realisasi dengan sisa dana sekitar 588.952.000,00. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar.

f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pagu : 248.800.000,00

Realisasi : 182.134.819

Persentase Kinerja : 73.21 %

“Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor” Terpenuhinya jasa kebersihan kantor yang memadai untuk sesuai kebutuhan kedinasan disetiap unit kerja yang di anggarkan untuk mendukung ketersediaan belanja kebersihan kantor. Ketersediaan kebersihan kantor tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan. Presentase tersedianya jasa kebersihan kantor tercapai lebih dari 70 %.



g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pagu : 250.000.000,00

Realisasi : 114.632.634

Persentase Kinerja : 45.85 %

“Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja” tingkat capaiannya telah mencapai 45.85 %. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja merupakan kegiatan intern instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada alat pelayanan internal bekerja dan. Indikator hasil daeri kegiatan ini adalah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja. Rata-rata jumlah peralatan kerja pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 27 peralatan. Secara umum berjalan dengan baik kegiatan ini.



h) Penyediaan alat tulis kantor

Pagu : 240.000.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Realisasi : 184.474.461

Persentase Kinerja : 78.86 %

“Jumlah alat tulis kantor” Terpenuhinya pengadaan alat tulis kantor yang memadai untuk kegiatan rutin sesuai kebutuhan kedinasan disetiap unit kerja yang di anggarkan untuk mendukung ketersediaan belanja ATK. Ketersediaan ATK pengadaan tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan. Presentase tersedianya alat tulis kantor tercapai lebih dari 100 jenis. Dengan realisasi target ini, tidak ditemukan kendala atau hambatan yang dihadapi. Namun demikian, evaluasi untuk mengupdate ATK yang lebih progres menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam perealisasi target indikator kinerja ini agar kedepan menjadi lebih lengkap dalam pengadaan ATK.

Dalam hal ini telah terpenuhinya target yang ditetapkan. Program Penyediaan Alat Tulis Kantor ini pagu anggaran sebesar 240.000.000,00 terealisasi sebesar 184.474.461,00 atau 78,86 % realisasi dengan sisa dana sekitar 135.367.366,00. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar tidak terkendala hambatan yang berarti. Setelah diteliti terkait pencapaian target realisasi dilihat dari jumlah ATK yang tersedia ternyata lebih dari 100 jenis ATK yang disediakan dalam 12 bulan kinerja.



i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Pagu : 117.800.000

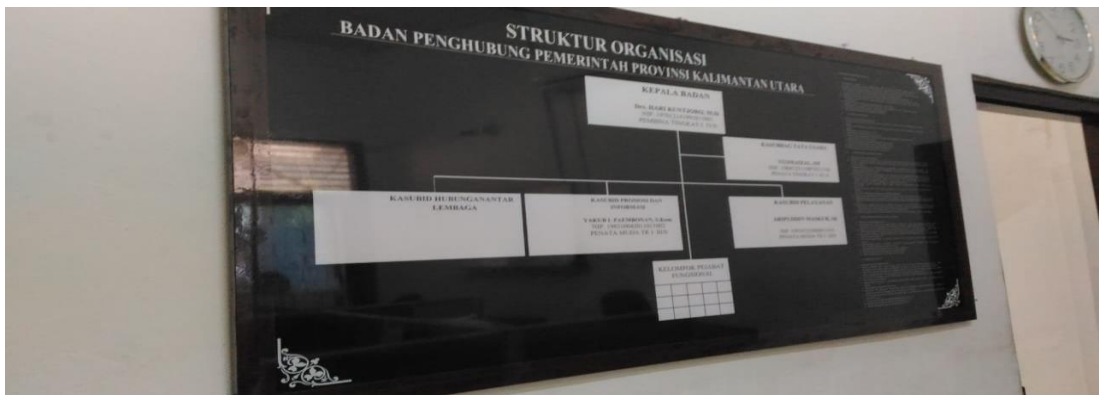
Realisasi : 95.814.640

Persentase Kinerja : 81.34 %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

“Jumlah bulan Barang cetakan dan hasil penggandaan” tercapainya prosentase rata-rata barang cetakan dan penggandaan yang digunakan dalam satu tahun yang meliputi cetak spanduk, cetak map dinas, cetak amplop, cetak undangan kegiatan, penggandaan cetakan amplop surat, cetak spanduk, dll cetak publikasi dan dokumentasi, pada tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target yang telah ditetapkan sebanyak 12 bulan telah dilalui dan berjalan dengan baik tahun anggaran. Dalam perealisasi target indikator kinerja, ketercapaiannya telah mencapai 78.86%. Hal ini didukung daripada banyaknya kegiatan surat undangan dan kegiatan Bapak Gubernur, yang terjadwal dan terlaksana pada tahun 2018. Dari daftar barang cetakan dan hasil penggandaan dimulai dari awal kegiatan dimulai seperti cetak undangan kegiatan, cetak spanduk, cetak struktur organisasi, dan spanduk acara. Sehingga karena frekuensi acara di Badan Penghubung padat dalam setiap tahun anggaran maka realisasi anggaran dalam kegiatan ini mencapai 81,34% yang mana pada tahun mendatang harus lebih dianggarkan lagi untuk mendukung kegiatan yang lebih besar lagi di tahun 2019 selain itu karena dilihat dari penyerapan anggarannya yang juga maksimal.



j) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu : 100.000.000

Realisasi : 50.534.000

Persentase Kinerja : 50.53 %

“Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor” tingkat capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan yakni 81.34 %. Kegiatan penyediaan kelistrikan merupakan kegiatan rutin instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada yang mengarah sebagai kebutuhan dasar

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

rumah tangga. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya instalasi listrik.

k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pagu : 393.200.000

Realisasi : 197.407.898

Persentase Kinerja : 50.21 %

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor” Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk sesuai kebutuhan kedinasan disetiap unit kerja yang di anggarkan untuk mendukung performa kinerja kantor. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan. Presentase tersedianya jasa kebersihan kantor tercapai lebih dari 50 .21 %.



l) Penyediaan peralatan rumah tangga

Pagu : 170.000.000

Realisasi : 51.550.781

Persentase Kinerja : 30.32 %

“Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga” tingkat capaiannya mencapai yakni 30.32 %. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga merupakan kegiatan rutin instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada alat kebutuhan dasar rumah tangga. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya alat rumah tangga/perabotan pendukung.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021



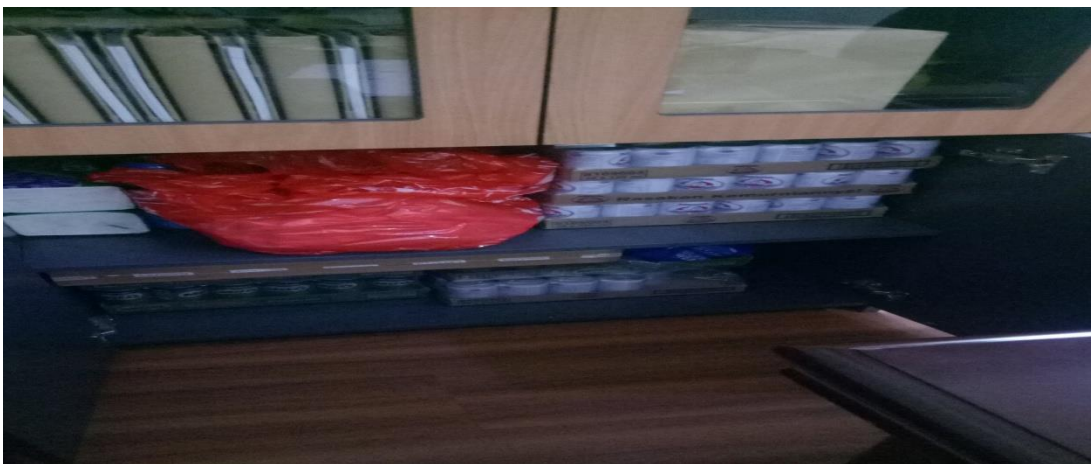
m) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pagu : 60.000.000

Realisasi : 26.422.698

Persentase Kinerja : 44.04 %

“Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan” tingkat capaiannya mencapai yakni 40.04 %. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga merupakan kegiatan rutin tahunan yang mana pelaksanaannya mengarah pada alat kebutuhan pengetahuan dan perundang-undangan. Indikator hasil daeri kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



n) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pagu : 624.024.000

Realisasi : 542.104.219

Persentase Kinerja : 86.87 %

“Jumlah porsi makan minum ” dengan anggaran 624.024.000 tingkat ketercapaiannya 86,87 %. Kegiatan ini akomodasi makanan dan minuman sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari badan penghubung, selain untuk rapat-rapat juga erat kaitannya dengan tamu mess milik pemerintah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Provinsi Kalimantan Utara. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya makan minum yang tertib administrasi.



Makanan da minuman rapat-rapat

o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pagu : 460.000.000,00

Realisasi : 459.957.433,00

Persentase Kinerja : 99.99 %

“Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah” kelancaran tugas satuan kerja, meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pengawasan pengelolaan pemerintahan, SKPD melaksanakan agenda konsultasi ke sejumlah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

kementerian/ lembaga dan di beberapa kota/instansi ke luar daerah. Dalam program ini dilaporkan bahwa pagu anggaran sebesar 460.000.000,00 dengan penyerapan sebesar 459.957.433,00 sebesar 99.99 % untuk realisasi keuangan. Kelancaran tugas satuan kerja, meningkatnya pelaksanaan koordinasi/rapat, Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pengawasan pengelolaan pemerintahan, SKPD melaksanakan agenda konsultasi di sejumlah Kementerian/Lembaga dan di beberapa pemerintah pemprov/kab/kota luar daerah. Dalam hal ini telah terpenuhinya target yang ditetapkan. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar, koordinasi ke luar daerah dan kementrian/lembaga tercover.

p) Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah

Pagu : 200.000.000,00

Realisasi : 180.511.250,00

Persentase Kinerja : 90.26 %

Kelancaran tugas satuan kerja, meningkatnya pelaksanaan koordinasi/rapat, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pengawasan pengelolaan pemerintahan, SKPD melaksanakan agenda konsultasi di sejumlah daerah dan di beberapa pem/kota di dalam daerah. Dalam kegiatan ini total pagu yang ada 200.000.000,00 dengan realisasi fisik 90.26 % dan prosentase penyerapan keuangan sebesar 180.511.250,00. Dari total kegiatan di tahun 2018 maka sisa dana sebesar 19.488.750,00.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional



Pagu : 1.960.000.000,00

Realisasi : 1.831.738.000,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Persentase Kinerja : 93.46 %

Kelancaran tugas satuan kerja, pengadaan kendaraan dinas operasional, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan, Dalam kegiatan ini total pagu yang ada 1.960.000.000,00 dengan realisasi fisik 93.46 % dan prosentase penyerapan keuangan sebesar 1.831.738.000,00.

b) Pengadaan Meubeleur

Pagu : 200.000.000,00

Realisasi : 180.511.250,00

Persentase Kinerja : 90.26 %

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Pagu : 650.500.000,00

Realisasi : 488.786.750,00

Persentase Kinerja : 75.14 %

Dalam perealisasi target ini, tidak ditemukan kendala atau hambatan yang berarti. Hal ini demi kelancaran kegiatan harian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pemeliharaan Rutin/gedung kantor ini pagu anggaran sebesar 650.500.000,00 terealisasi sebesar 75.14%. Secara umum kegiatan ini berjalan lancar.

d) Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Pagu : 1.800.000.000,00

Realisasi : 1.325.434.856,00

Persentase Kinerja : 73.64 %

Dalam perealisasi target ini, tidak ditemukan kendala atau hambatan yang berarti. Hal ini demi kelancaran kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pemeliharaan kendaraan dinas operasional ini pagu anggaran sebesar 1.800.000.000,00 terealisasi 1.325.434.856

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pagu : 200.000,00

Realisasi : 54.425.683,00

Persentase Kinerja : 27.21 %

4. Program Peningkatan Manajemen Kerja

a) Keprotokolan dan Fasilitas Pejabat Daerah/pusat

Pagu : 2.783.600,00

Realisasi : 2.484.614.024,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA. 2021

Persentase Kinerja : 89.26 %

b) Pelayanan Mess

Pagu : 294.960.000,00

Realisasi : 163.212.978,00

Persentase Kinerja : 55.33 %

BAB IV

PENUTUP

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja SKPD Badan Penghubung Tahun 2018 dengan capaian kinerja sangat baik. Masih terdapat upaya-upaya perbaikan kinerja yang harus dilaksanakan pimpinan dan staf Badan Penghubung untuk mewujudkan kinerja yang lebih akuntabel.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LKJp) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini dibuat. semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN